



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( RBA ) SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9538);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 / PMK.02 / 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( RBA ) SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi Arus Kas, jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
5. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Dinas/Biro keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

### Bagian Pertama Penyusunan

#### Pasal 2

- (1) BLUD menyusun RSB wajib mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (2) BLUD menyusun RBA dengan mengacu kepada RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pertengahan tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
  - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
  - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan / Lembaga lain, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBN
  - c. RBA meliputi :
    - Ringkasan Eksekutif
    - BAB I PENDAHULUAN
    - BAB II KENERJA BLUD TAHUN BERJALAN
    - BAB III RBA TAHUN ANGGARAN
    - BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
    - BAB V PENUTUP
- (4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
  - b. Hibah tidak terikat dan / atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan / Lembaga lain.
  - c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya.
  - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten / APBD Propinsi dan APBN.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran flexibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, setinggi – tingginya 10 % (sepuluh persen ) dari RBA difinitif.
- (6) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD dengan memperhatikan proyeksi pendapatan yang dituangkan dalam RSB-BLUD yang bersangkutan.
- (7) Pola anggaran flexible sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk belanja dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali huruf d dan hibah terikat.

- (8) Penyusunan RBA-BLUD dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Pengajuan**

### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran ( out put ) yang akan dihasilkan.

## **Bagian Ketiga Konsolidasi dengan APBD**

### **Pasal 4**

- (1) RBA-BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (2) Pendapatan BLUD, selain dari APBD / APBN masuk dalam APBD
- (3) Seluruh pengeluaran BLUD, masuk dalam belanja APBD sesuai jenis belanja dalam APBD.

## **Bagian Keempat Penetapan**

### **Pasal 5**

- (1) PPKD bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah ( TPAD ) mengkaji usulan RBA-BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengakajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup Standar Biaya dan Anggaran BLUD, kinerja keuangan serta besaran prosentase ambang batas.
- (3) Besaran prosentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD, yaitu kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Hasil pengkajian atas RBA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA Pemerintah Daerah sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi RBA definitif.

BAB III  
DPA BLUD

**Bagian Pertama**  
**Penyusunan dan Pengesahan**

**Pasal 6**

- (1) RBA-BLUD definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) digunakan dasar sebagai penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada Bupati.
- (2) DPA-BLUD memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi Arus Kas, jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten / Propinsi dan APBN, serta besaran prosentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA-BLUD definitif.
- (3) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD dengan menerbitkan Surat Pengesahan DPA-BLUD yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Dana**

**Pasal 7**

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan / atau jasa, dilakukan sesuai ketentuan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran Kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

**Pasal 8**

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain, dan / atau hasil usaha lainnya, dapat dikelola langsung sesuai dengan RBA-BLUD definitif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Lembaga/Badan lain, harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana DPA-BLUD, diatur oleh PPKD.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 9**

- (1) DPA-BLUD menjadi Lampiran Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD,
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dengan Pimpinan BLUD yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (*Contractual Performance Agreement*)
- (3) Muatan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 10**

- (1) Perubahan terhadap RBA-BLUD definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila :
  - a. Terdapat pengurangan atau penambahan pagu anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten / Propinsi dan / atau APBN.
  - b. Belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang berlaku pada penyusunan / pengajuan / penetapan RBA-BLUD dan DPA-BLUD.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 11**

- (1) Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran, PPK-BLUD wajib menyampaikan laporan keuangan, yang terdiri dari :  
Laporan realisasi Anggaran / Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan batas waktu sebagai berikut :
- (3) Laporan triwulan paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Untuk laporan tahunan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang bersifat teknis operasional diatur oleh PPKD sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal 30 Januari 2009

BUPATI JEPARA,





HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 30 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 4

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HUKUM	

PENDAHULUAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BINSIS DAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD )

I. SISTEMATIKA RBA-BLUD :

- Ringkasan Eksekutif
- BAB I           PENDAHULUAN
- BAB II           KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN
- BAB III          RBA TAHUN ANGGARAN
- BAB IV          PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
- BAB V          PENUTUP

II. PENJELASAN

**Ringkasan Eksekutif**

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun berjalan dan target kinerja tahun yang akan datang yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun berjalan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

1. Gambaran Umum
  - a. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mendasari operasional BLUD.
  - b. *Nature of business* BLUD  
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.
2. Visi Badan Layanan Umum Daerah  
Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
3. Misi Badan Layanan Umum Daerah  
Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
4. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum Daerah  
Keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai oleh BLUD melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah  
Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
6. Budaya Badan Layanan Umum Daerah  
Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen.
7. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
  - a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
  - b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
  - c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

## BAB II KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN

1. Kondisi Eksternal dan Internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Tahun Berjalan.
  - A. Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja.
  - B. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

- 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, yang meliputi :

- a) Pelayanan;
- b) Keuangan;
- c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d) Sarana dan Prasarana.

- 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya.

BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut agar tergambar pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh :

- a) Undang-undang;
- b) Kebijakan Pemerintah;
- c) Keadaan persaingan;
- d) Keadaan perekonomian baik regional, nasional maupun internasional;
- e) Perkembangan sosial budaya;
- f) Perkembangan teknologi.

2. Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjalan dengan realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan.

Disini digambarkan asumsi-asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi yang terjadi, apakah ada penyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan tersebut.

Mungkin kinerja tahun berjalan tidak tercapai karena asumsi yang digunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena asumsinya berbeda.

Contoh :

Dengan asumsi peningkatan pelayanan rata-rata 5% pada RBA tahun berjalan terlihat dari Realisasi periode Januari-Agustus tahun berjalan telah tercapai 60% (8 bulan) dan Prognosa sampai dengan Desember tahun berjalan akan tercapai rata-rata 100% dari target. Jika tidak tercapai dijelaskan apakah karena asumsinya *over estimated* serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dicapai tahun berjalan.

3. Pencapaian kinerja per unit, misalnya ;

- A. Unit Pelayanan

- 1). Pelayanan A
    - 2). Pelayanan B
    - 3). Pelayanan C
    - 4). Dst.

- B. Unit Keuangan
  - 1). Keuangan
  - 2). Akuntansi
  - 3). dst
- C. Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - 1). Diklat
  - 2). Logistik
  - 3). Dst
- D. Unit Sarana dan Prasarana Penunjang
  - 1). Penunjang A
  - 2). Penunjang B
  - 3). dst.

(A s.d D agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang telah dicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing-masing bidang untuk melihat posisi saat ini dari masing-masing unit). Jumlah dan jenis unit disesuaikan dengan struktur dan kondisi masing-masing BLUD. Pencapaian kinerja harus terutang dalam volume kegiatan tiap-tiap unit dan jumlah rupiah.

Contoh tabel Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan :

**Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan**

No	Uraian	RBA Tahun Berjalan		Realisasi s/d bulan.....		Prognosa Tahun Berjalan	
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
1	Pelayanan A						
2	Pelayanan B						
3	Pelayanan C						
	Jumlah						

#### 4. Pencapaian Program Investasi

Disamping gambaran pencapaian kinerja tiap unit seperti contoh tersebut di atas, maka perlu disusun program investasi dan pencapaiannya selama tahun berjalan dan prognosa tahun berjalan.

Contoh : Program dan Pencapaian Investasi Tahun berjalan.

No	Program Investasi	RBA Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s/d bulan.... (Rp)	Prognosa Tahun Berjalan (Rp)
A	Sumber APBN			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
B	Sumber Pendapatan Operasional			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
	Jumlah			

#### 5. Laporan Keuangan Tahun Berjalan

Selain gambaran pencapaian kinerja tiap unit dan program investasi serta pencapaiannya selama tahun berjalan berikut prognosa tahun berjalan, maka perlu dilengkapi dengan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.

Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Contoh Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari :

a). Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Tahun Berjalan.

Contoh Neraca

**NERACA**  
Per 31 Desember.....

URAIAN	RBA TAHUN BERJALAN	PROGNOSA TAHUN BERJALAN	%
1	2	3	4 (2)
<b>I. ASET</b>			
A. Aset Lancar			
1). Kas dan Setara Kas			
2). Investasi jangka pendek			
3). Piutang Usaha			
4). Piutang lain-lain			
5). Persediaan			
6). Uang Muka			
7). Pendapatan Yang Masih Harus diterima			
Jumlah Aset Lancar			
B. Aset Tetap			
1). Tanah			
2). Bangunan			
3). Peralatan			
4). Kendaraan			
5). Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
Jumlah aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan			
Nilai buku aset tetap			
C. Aset lain-lain			
<b>Jumlah Aset</b>			
<b>II. KEWAJIBAN</b>			
A. Kewajiban Jangka Pendek			
1). Hutang Usaha			
2). Hutang Pajak			
3). Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
4). Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
5). Pendapatan yang Ditangguhkan			
6). Hutang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
B. Kewajiban Jangka Panjang			
<b>Jumlah Kewajiban</b>			
<b>III. EKUITAS</b>			
1). Ekuitas Awal			
2). Ekuitas Pemerintah			
3). Ekuitas Donasi			
4). Surplus dan Defisit tahun lalu			
5). Surplus dan Defisit tahun berjalan			
<b>Jumlah Ekuitas</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			

b). Laporan Aktivitas Tahunan Berjalan

Contoh Laporan Aktivitas

LAPORAN AKTIVITAS  
TAHUN.....

URAIAN	RBA TAHUN BERJALAN	PROGNOSA TAHUN BERJALAN	%
1	2	3	4 (2)
<b>A. PENDAPATAN</b>			
1. Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan			
a). .....			
b). .....			
2. Hibah			
a). Terikat			
b). Tidak Terikat			
3. Pendapatan Lainnya			
a). Hasil Kerjasama dengan pihak lain			
b). Hasil Usaha Lain			
c). Dan lain-lain			
4. Pendapatan dari APHD Kabupaten/Propinsi			
a). Operasional			
b). Investasi			
5. Pendapatan dari APHN			
a). Operasional			
b). Investasi			
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>			
1. Biaya Pelayanan			
a). Biaya Pegawai			
b). Biaya bahan			
c). Biaya Jasa Pelayanan			
d). Biaya Pemeliharaan			
e). Biaya Daya dan Jasa			
f). Dan lain-lain			
2. Biaya Umum dan Administrasi			
a). Biaya Pegawai			
b). Biaya Administrasi Kantor			
c). Biaya Pemeliharaan			
d). Biaya Langganan Daya dan Jasa			
e). Biaya Promosi			
f). Dan lain-lain			
<b>Jumlah Biaya umum dan Administrasi</b>			
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>			
<b>C. SURPLUS/DEFISIT SETELAH BIAYA OPERASIONAL</b>			
1. Pendapatan Non Operasional			
a). Pendapatan Jasa lembaga Keuangan			
b). Pendapatan Sewa			
c). Hasil Penjualan Aset Tetap			
d). Non operasional Lainnya			
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>			
2. Biaya Non Operasional			
a). Biaya Bunga			
b). Biaya Administrasi bank			
c). Rugi Penjualan Aset Tetap			
d). Rugi Penurunan Nilai Persediaan			
e). Biaya Non Operasional Lainnya			
<b>Jumlah Biaya Non Operasional</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN</b>			

c). Laporan Arus Kas

Contoh Laporan Arus Kas

**LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN.....**

URAIAN	RBA Satu Tahun	Triwulan			Prognosa Triwulan IV
		I	II	III	
I	2	3	4	5	6
<b>I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional</b>					
A. Pendapatan dari Layanan					
B. Pengeluaran Operasional					
Arus Kas Bersih dar Aktivitas Operasional					
<b>II. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>					
A. Hasil Penjualan Aset Tetap					
B. Hasil Penjualan Aset lain-lain					
C. Perolehan Aset Tetap					
Arus Kas bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi					
<b>III. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>					
A. Tambahan Ekuitas					
B. Penerimaan Hibah					
C. Penerimaan APBN / APBD					
D. Perolehan Pinjaman					
E. Pembayaran Pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan setara Kas Awal					
<b>Jumlah Saldo Kas</b>					

d). Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari penjelasan tentang Kebijakan Akuntansi, penjelasan pos-pos Neraca dan Laporan Aktivitas serta Rasio Keuangan.

Tabel  
**PROGNOSA RASIO KEUANGAN  
TAHUN.....**

NO	URAIAN	FORMULA	HASIL
<b>A.</b>	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>		
1	<i>Cash Ratio</i> (Rasio Kas)	$\frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	... %
2	<i>Current Ratio</i> (Rasio Lancar)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	... %
3	<i>Net Working Capital of sales</i> (Perbandingan Modal Kerja Bersih Dengan Penjualan)	$\frac{\text{Modal Kerja Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	... %
<b>B.</b>	<b>RASIO AKTIVITAS</b>		
1	<i>Inventory Turn Over</i> (Perputaran Persediaan)	$\frac{\text{Penjualan Bruto}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$	... kali
2	<i>Receivable Turn Over</i> (Perputaran Piutang)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Piutang}} \times 100\%$	... kali
3	<i>Collection Period</i> (Periode Perputaran Piutang)	Piutang x 360 hari	... kali

		Pendapatan Netto		
4	<i>Current Asset Turn Over</i> (Perputaran aset lancar)	$\frac{\text{Pendapatan Netto}}{\text{Aset Lancar}}$	X 100%	... kali
5	<i>Fixed Asset Turn Over</i> (Perputaran Aset tetap)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Aset Tetap}}$	X 100%	... kali
6	<i>Total Asset Turn Over</i> (Perputaran Total asset)	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Total Aset}}$	X 100%	... kali
7	<i>Sales to Net Working Capital</i> (Rasio Penjualan terhadap Modal Kerja )	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Net Working Capital}}$	X 100%	... kali
<b>C. RASIO TINGKAT HUTANG</b>				
1	<i>Debt to Total Asset</i> (Rasio hutang terhadap Total asset)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	X 100%	... %
2	<i>Time Interest Earned</i> (Rasio Pencakupan Bunga)	$\frac{\text{EBIT}^*)}{\text{Bunga}}$	X 100%	... %
<b>D. RASIO SOLVABILITAS</b>				
1	<i>Salvabilitas</i> (Rasio Total Aset terhadap hutang)	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}}$	X 100%	... %
2	<i>Debt to Equito Ratio</i> (Rasio utang terhadap Ekuitas)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Equity}}$	X 100%	... %
<b>E. RASIO RENTABILITAS</b>				
1	<i>Gross Profit Margin</i> (Rasio Margin Laba Kotor)	$\frac{\text{Surplus Operasional}}{\text{Pendapatan Netto}}$	X 100%	... kali
2	<i>Net Profit Margin</i> (Margin Laba Usaha Bersih)	$\frac{\text{Surplus Operasional}}{\text{Pendapatan Netto}}$	X 100%	... kali
3	<i>Net Return of Investmen</i> (Tingkat Pengembalian Investasi Bersih)	$\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	X 100%	... kali
4	<i>Return on Capital Employed</i> (Tingkat Pengembalian Modal)	$\frac{\text{EBIT}^*)}{\text{Capital Employed}}$	X 100%	... kali
5	<i>Net Return on Equity</i> (Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Equity}}$	X 100%	... kali

Catatan : Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan BLUD yang bersangkutan  
 \*) EBIT= *Earning Before Interest and Tax* (Laba Sebelum Bunga dan Pajak)

6. Hal – hal lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja BLUD, misalnya :

- a) Penghapusan piutang;  
 Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan piutang, jumlah piutang yang dihapuskan oleh BLUD.
- b). Penghapusan persediaan;  
 Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan, jumlah persediaan yang dihapuskan oleh BLUD.
- c). Penghapusan Aset Tetap;  
 Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan Aset tetap, jumlah Aset tetap yang dihapuskan oleh BLUD.

d). Penghapusan Aset lain-lain:

Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan Aset lain lain, jumlah Aset lain-lain yang dihapuskan oleh BLUD.

e). Pemberian Pinjaman

Penjelasan mengenai ketentuan pemberian pinjaman non operasional kepada karyawan, jumlah pemberian pinjaman non operasional.

f). Kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga: Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga, bentuk kerjasama dengan pihak ketiga misal : KSO, Sewa, dll.

g). Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.

Penjelasan mengenai penetapan Penghasilan Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.

**BAB III**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD**  
**TAHUN ANGGARAN ....**

I. Gambaran Umum tentang analisis eksternal dan internal BLUD

A. Analisis Internal

Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, hingga saat disusunnya RBA, yang meliputi:

- 1) Pelayanan;
- 2) Keuangan;
- 3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Sarana dan Prasarana

B. Analisis Eksternal

Analisis eksternal adalah analisis kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya hingga saat disusunnya RBA. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang.

Cakupan analisis kondisi eksternal antara lain:

- 1) Undang-undang;
- 2) Kebijakan Pemerintah;
- 3) Keadaan Persaingan;
- 4) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;
- 5) Perkembangan sosial budaya;
- 6) Perkembangan teknologi.

2. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran .... :

A. Asumsi Makro, antara lain:

- 1). Tingkat Inflasi ... %
- 2). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ... %
- 3). Kurs 1 US\$ = Rp ....
- 4). Tingkat Bunga Deposito.... %
- 5). Tingkat Bunga Pinjaman.... %

B. Asumsi Mikro, antara lain:

- 1). Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 2). Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 3). Asumsi tarif;
- 4). Asumsi volume pelayanan;
- 5). Pengembangan pelayanan baru;
- 6). Asumsi Total Pendapatan;
- 7). Asumsi Total Biaya;
- 8). Asumsi Total Output;
- 9). Asumsi biaya per output.

3. Target Kinerja BLUD meliputi antara lain:

- a. Unit Pelayanan :
  - Sasaran;
  - Strategi;
  - Kebijakan;
  - Program Kerja.
- b. Unit Keuangan :
  - Sasaran;
  - Strategi;
  - Kebijakan;
  - Program Kerja.
- c. Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia:
  - Sasaran;
  - Strategi;
  - Kebijakan;
  - Program Kerja.
- d. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) :
  - Sasaran;
  - Strategi;
  - Kebijakan;
  - Program Kerja.

Contoh Sasaran

- a. Sasaran unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% dari yang sebelumnya (value dari BLUD).
- b. Sasaran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel.
- c. Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu meningkatkan kompetensi pegawai.
- d. Sasaran Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

Contoh Strategi

- a. Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan dan menambah jumlah pegawai pelayanan.
- b. Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tepat waktu.
- c. Strategi Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu mengadakan pelatihan dalam bentuk modul-modul seperti komunikasi skill, komunikasi empati, dan sistem pendokumentasian.
- d. Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah peralatan yang digunakan untuk pelayanan.

Contoh Kebijakan per unit

- a. Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standar dan peningkatan mutu SDM.
- b. Kebijakan Unit Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha.

- c. Kebijakan Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk Diklat yaitu adanya kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan.
- d. Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara mengganti peralatan yang lama dengan peralatan yang lebih modern.

**Contoh Program**

- a. Program Unit Pelayanan yaitu mengusulkan rekrutmen tenaga pekarya, merealisasikan rencana penambahan fasilitas pelayanan.
- b. Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan dan tahunan, menyempurnakan sistem akuntansi biaya, membuat program piutang dan pengel'olaan arus kas yang optimal.
- c. Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, membuat konten dan pengajar pelatihan.
- d. Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian peralatan-peralatan barn.

**Keterangan :**

- Program kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit untuk menyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor BPK, BPKP, temuan SPI serta permasalahan lainnya yang dihadapi BLUD.
- Dalam penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja hams diupayakan adanya saling keterkaitan sehingga dapat dilihat "benang merah" secara jelas.
- Buat tabel keterkaitan antaraSasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Jadwal waktu pencapaiannya dari masing-masing bidang, seperti tabel di bawah ini.

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KERJA	JADWAL WAKTU		
					Triw. I	Triw. II	Triw. III

**4. Analisa dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat**

- a. Contoh table perhitungan anggaran per kegiatan dan output

Unit Kerja :		Tahun :
Program :		
Kegiatan :		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan		
Keluaran		

Anggaran Belanja		
Jenis Belanja	Rincian Biaya (Satuan x Harga )	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>I. Biaya Langsung</b>		
A. Biaya Variabel		
1. Biaya.....		
2. Biaya.....		
3. Dst...		
Jumlah Biaya Variabel		
B. Biaya Tetap		
1. Biaya.....		
2. Biaya.....		
3. Dst...		
Jumlah Biaya Tetap		
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		
<b>II. Biaya Tidak Langsung</b>		
A. Biaya Variabel		
4. Biaya.....		
5. Biaya.....		
6. Dst...		
Jumlah Biaya Variabel		
B. Biaya Tetap		
1. Biaya.....		
2. Biaya.....		
3. Dst...		
Jumlah Biaya Tetap		
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>		
<b>Jumlah Biaya</b>		
<b>Biaya Per Unit Output</b>		

b. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya agregat

NO	Uraian Kegiatan	RBA Tahun Anggaran		
		Jumlah	Biaya (Rp)	Output
1	.....			
2	.....			
3	.....			
	Jumlah Biaya Agregat			

5. Perkiraan Harga

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya Per Unit Output	
2	Margin (....%)	
3	Harga jual per unit output ( 1+2 )	

6. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit

Contoh Tabel Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit :

Unit Kerja :		Tahun :	
		Output	
		(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
Uraian		Jumlah Anggaran	
		(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
<b>I. Pendapatan :</b>			
1. Pendapatan dari Pelayanan			
2. Pendapatan dari Hibah			

3. Pendapatan....		
4. Dst...		
Jumlah Pendapatan		
<b>II. Biaya :</b>		
A. Biaya Langsung :		
1. Biaya...		
2. Biaya...		
3. Biaya...		
4. Dst...		
B. Biaya Tidak Langsung :		
1. Biaya...		
2. Biaya...		
3. Biaya...		
4. Biaya...		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
<b>Jumlah Biaya</b>		
<b>Surplus/Defisit</b>		

7. Rencana Pendapatan dan Biaya BLUD  
 Contoh Rencana Pendapatan dan Biaya BLUD

Uraian	Jumlah Anggaran	
	(tahun berjalan)	(tahun yang diusulkan)
<b>I. Pendapatan :</b>		
1. Pendapatan dari Pelayanan		
2. Pendapatan dari Hibah		
3. Pendapatan....		
4. Dst...		
Jumlah Pendapatan		
<b>II. Biaya :</b>		
A. Biaya Langsung :		
1. Biaya...		
2. Biaya...		
3. Biaya...		
4. Dst...		
B. Biaya Tidak Langsung :		
1. Biaya...		
2. Biaya...		
3. Biaya...		
4. Biaya...		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
<b>Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari APBN</b>		
<b>Pendapatan dari APBN</b>		
<b>Surplus/Defisit Akhir</b>		

8. Anggaran BLUD

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dananya bersumber dari pendapatan operasional BLUD maupun APBN/APBD.

A. Pendapatan BLUD

Adalah pendapatan yang akan diperoleh BLUD terdiri dari :

- 1) Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pemberian pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- 3) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya; dan atau
- 4) Penerimaan yang bersumber dari APBN/APBD Propinsi / APBD Kabupaten.

Selanjutnya pendapatan disajikan seperti contoh tabel berikut :

No	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
1.	Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan				
	a).....				
	b).....				
2.	Hibah				
	a). Terikat				
	b). Tidak Terikat				
3.	Pendapatan Lainnya				
	a). Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
	b). Hasil Usaha Lainnya				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a). Operasional				
	b). Investasi				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a). Operasional				
	b). Investasi				
	<b>Jumlah Pendapatan.</b>				

### B. Biaya Operasional

Biaya Operasional BLUD meliputi biaya pelayanan dan biaya umum administrasi. Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-biaya operasional yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan BLUD. Selanjutnya biaya operasional agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

No	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
A.	Biaya Pelayanan				
	1. Biaya Bahan				
	2. Biaya Pegawai				
	3. Biaya bahan baku				
	4. Biaya Jasa Pelayanan				
	5. Biaya Penyusutan				
	6. Biaya Pemeliharaan				
	7. Biaya Daya dan Jasa				
	8. Biaya Amortisasi				
	9. Biaya Asumsi				
	10. ...dst.				
	<b>Jumlah Biaya Pelayanan</b>				
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
	1. Biaya Pegawai				
	2. Biaya Administrasi Kantor				
	3. Biaya Penyusutan				
	4. Biaya daya dan Jasa				
	5. Biaya Promosi				
	6. Biaya Amortisasi				
	7. ...dst.				
	<b>Jumlah Biaya Umum dan Adm</b>				
	<b>Jumlah Biaya Operasional</b>				

Catatan :

Transaksi Akrua ( biaya penyusutan, biaya amortisasi) harus dikeluarkan ketika RBA digabungkan dengan RKA Kabupaten.

C. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penelitian dan pengembangan yang dapat menguntungkan BLUD dalam menghasilkan pendapatan meningkatkan mutu pelayanan seperti biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan.

Biaya penelitian dan pengembangan agar disajikan seperti contoh tabel berikut:

No	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
1	Penelitian dan Pengembangan				
	a.....				
	b.....				
2	Pendidikan dan Pelatihan				
	a.....				
	b.....				
	Jumlah Biaya Penelitian dan Pengembangan				

D. Biaya Investasi (Belanja Modal)

Biaya Investasi (biaya modal) adalah anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.

Biaya Investasi (belanja modal) agar disajikan seperti contoh tabel berikut :

No	URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	TARGET PERIODE YANG AKAN DATANG	PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	%
1	Sumber dari APBN / APBD				
	a.....				
	b.....				
2	Sumber dari Pendapatan Operasional				
	a.....				
	b.....				
	Jumlah Investasi				

Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan :

- 1). Anggaran seluruh investasi sampai selesai;
- 2). Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan;
- 3). Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran.

Ketiga hal di atas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk persentase.

9. Ambang Batas Belanja BLUD

Belanja BLUD dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*).

Dalam menghitung besaran ambang batas belanja tersebut BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik / turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLUD dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Bupati.

Contoh:

Ambang batas yang ditetapkan oleh Bupati sebesar 10% dari target pendapatan operasional sebesar Rp 10.000.000.000,00 (di luar pendapatan dari APBN / APBD). Maka besaran ambang batas adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 ( $10\% \times \text{Rp } 10.000.000.000,00$ ). Dengan demikian, apabila realisasi pendapatan masih dibawah ambang batas yang ditetapkan (Rp. 11.000.000.000,00), maka pendapatan tersebut dapat langsung digunakan tanpa harus mendapatkan izin dari Bupati terlebih dahulu.

**BAB IV**  
**PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .....**

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang akan datang terdiri dari :

**I. Proyeksi Neraca**

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proyeksi posisi keuangan BLU pada suatu saat tertentu.

Contoh tabel neraca :

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER...**

URAIAN	PROGNOSA PERIODE TAHUN BERJALAN	PROYEKSI PERIODE YANG AKAN DATANG	PERUBAHAN	
			Rupiah	%
1	2	3	4 (3-2)	5
<b>I. ASET</b>				
A. Aset Lancar				
1). Kas dan Setara Kas				
2). Investasi jangka pendek				
3). Piutang Usaha				
4). Piutang lain-lain				
5). Persediaan				
6). Uang Muka				
7). Pendapatan Yang Masih Harus diterima				
<b>Jumlah Aset Lancar</b>				
B. Aset Tetap				
1). Tanah				
2). Bangunan				
3). Peralatan				
4). Kendaraan				
5). Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
Jumlah aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan				
Nilai buku aset tetap				
C. Aset lain-lain				
1).....				
2).....				
<b>Jumlah Aset</b>				
<b>II. KEWAJIBAN</b>				
A. Kewajiban Jangka Pendek				
1). Hutang Usaha				
2). Hutang Pajak				
3). Hutang lain-lain				
4). Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
5). Hutang Jangka Pajang Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
<b>Jumlah Kewajiban</b>				
<b>III. EKUITAS</b>				
1). Ekuitas Awal				
2). Ekuitas Pemerintah				
3). Ekuitas Donasi				
4). Surplus dan Defisit tahun lalu				
5). Surplus dan Defisit tahun berjalan				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				

## 2. Proyeksi Laporan Aktivitas

Proyeksi laporan aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat member gambaran mengenai kegiatan pelayanan BLUD pada periode tertentu.

Contoh tabel Laporan Aktivitas

### LAPORAN AKTIVITAS TAHUN...

URAIAN	PROGNOSE PERIODE TAHUN BERJALAN	PROYEKSI PERIODE YANG AKAN DATANG	PERUBAHAN	
			Rupiah	%
1	2	3	4 (3-2)	5
<b>A. PENDAPATAN</b>				
1. Pendapatan Operasional dari Jasa Layanan				
a). .....				
b). .....				
2. Hibah				
a). Terikat				
b). Tidak Terikat				
3. Pendapatan Lainnya				
a). Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
b). Hasil Usaha Lain				
c). Dan lain-lain				
4. Pendapatan dari APBD				
a). Operasional				
b). Investasi				
5. Pendapatan dari APBN				
a). Operasional				
b). Investasi				
<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>				
1. Biaya Pelayanan				
a). Biaya Pegawai				
b). Biaya bahan				
c). Biaya Jasa Pelayanan				
d). Biaya Pemeliharaan				
e). Biaya Daya dan Jasa				
f). Dan lain-lain				
2. Biaya Umum dan Administrasi				
a). Biaya Pegawai				
b). Biaya Administrasi Kantor				
c). Biaya Pemeliharaan				
d). Biaya Langganan Daya dan Jasa				
e). Biaya Promosi				
f). Dan lain-lain				
<b>Jumlah Biaya umum dan Administrasi</b>				
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>				
<b>C. SURPLUS/DEFISIT SETELAH BIAYA OPERASIONAL</b>				
1. Pendapatan Non Operasional				
a). Pendapatan Jasa lembaga Keuangan				
b). Pendapatan Sewa				
c). Hasil Penjualan Aset Tetap				
d). Non operasional Lainnya				
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>				
2. Biaya Non Operasional				
a). Biaya Bunga				
b). Biaya Administrasi bank				

## BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
  - a. Penghapusan piutang;
  - b. Penghapusan persediaan;
  - c. Penghapusan Aset tetap;
  - d. Penghapusan Aset lain-lain;
  - e. Pemberian pinjaman;
  - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g. Pengkajian pengelola dan Dewan Pengawas BLUD.

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

c).	Rugi Penjualan Aset Tetap				
d).	Rugi Penurunan Nilai Persediaan				
e).	Biaya Non Operasional Lainnya				
	Jumlah Biaya Non Operasional				
<b>D.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN</b>				

### 3. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan posisi keuangan selama periode tertentu.

Contoh tabel arus kas :

#### ARUS KAS TAHUN....




URAIAN	PROYEKSI RBA THN YG AKAN DATANG	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1	2	3	4 (3-2)	5	6
<b>I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional</b>					
A. Pendapatan dari Layanan					
B. Pengeluaran Operasional					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional					
<b>II. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>					
A. Hasil Penjualan Aset Tetap					
B. Hasil Penjualan Aset lain-lain					
C. Perolehan Aset Tetap					
Arus Kas bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi					
<b>III. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>					
A. Tambahan Ekuitas					
B. Penerimaan Hibah					
C. Penerimaan APBN					
D. Perolehan Pinjaman					
E. Pembayaran Pinjaman					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan setara Kas Awal					
<b>Jumlah Saldo Kas</b>					

### 4. Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas :

- pos-pos neraca,
- laporan aktivitas,
- kebijakan akuntansi
- rasio keuangan, dan
- hal lain yang dipandang perlu.

## BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
  - a. Penghapusan piutang;
  - b. Penghapusan persediaan;
  - c. Penghapusan Aset tetap;
  - d. Penghapusan Aset lain-lain;
  - e. Pemberian pinjaman;
  - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g. Pengkajian pengelola dan Dewan Pengawas BLUD.

PERIKLITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>pu</i>	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

  
HENDRO MARTOJO